

BAB V

KESIMPULAN

Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kubang dalam menuntut pengembalian tanah ulayat mereka, dari zaman Belanda sampai era Reformasi memiliki pola yang sama yaitu selalu mengambil momentum yang menguntungkan mereka, seperti memanfaatkan momen pemberontakan Silungkang yang dimotori oleh komunis dalam melawan penjajahan Belanda serta di era Reformasi masyarakat Nagari Kubang memanfaatkan euphoria Reformasi dimana adanya kebebasan mengemukakan pendapat dan berbicara. Sehingga, tuntutan yang terpendam selama Orde Baru dapat dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak yang terlibat.

Berbagai upaya dan perjuangan telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Kubang untuk mengembalikan tanah ulayat milik mereka, mulai dari pengiriman somasi kepada Pemerintah Daerah dan PT.BA UPO yang tidak pernah ada tanggapan sampai dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan pimpinan PT.BA dan Pemerintah Daerah. Namun, upaya tersebut tetap tidak memberikan titik terang bagi masyarakat Nagari Kubang.

Belum berhasilnya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kubang ini disebabkan karena adanya dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu adanya perpecahan dalam masyarakat Nagari Kubang itu sendiri dimana tidak kompaknya para Ninik Mamak sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah enggan untuk menyelesaikan

karena dianggap sebagai keinginan sepihak saja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu adanya tokoh-tokoh dari masyarakat Nagari Kubang yang diberi jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, sehingga pemerintah memanfaatkan kedudukan tersebut agar mereka berpihak kepada pemerintah. Selain itu, pihak pemerintah tidak bersedia untuk menyelesaikan dengan alasan tidak adanya alokasi dana untuk penyelesaian konflik tersebut. Sehingga konflik tanah ulayat Nagari Kubang masih belum bisa diselesaikan sampai saat ini.

Agar perjuangan masyarakat Nagari Kubang dapat menemukan titik terang, sebaiknya masyarakat Nagari Kubang bisa bersatu dan mampu mengatasi perpecahan yang terjadi sehingga menimbulkan kepercayaan dari pihak pemerintah bahwa tuntutan yang dilakukan memang dari seluruh masyarakat bukan karena keinginan dari pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya bagi elit-elit Nagari atau orang-orang yang memiliki pengaruh agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak luar serta tidak mudah diiming-imingi jabatan ataupun kekuasaan.

